

## EVALUASI STRATEGI PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2022

Oleh:

Eni Ratnawati<sup>1</sup>; Suwardi<sup>2</sup>; Herning Suryo Sardjono<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta dan Pemerintahan Kabupaten Madiun, eniratnawati@gmail.com.

<sup>2</sup> Program Studi S2 MAP Universitas Slamet Riyadi Surakarta, suwardi.unisri@gmail.com.

<sup>3</sup> Faculty of Social and Political Science, Universitas Slamet Riyadi Surakarta herningsuryo@gmail.com.

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa efektifitas dan efisiensi strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun di Tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif menggunakan pendekatan kualitatif dengan beberapa sumber informan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Di Kabupaten Madiun belum efektif secara maksimal meskipun untuk beberapa indikator mencapai target. Untuk indikator Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana dari target sebesar 68,20% hanya tercapai sebesar 43,18%, atau capaian sebesar 63,31%. Sedangkan indikator Persentase korban terdampak bencana yang ditangani dan indikator Persentase pemulihan pasca bencana yang direalisasikan tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Untuk Tingkat efisiensi kinerja BPBD Kabupaten Madiun, ada beberapa indikator yang capaiannya melebihi target. Diantaranya adalah Jumlah kejadian bencana yang ditangani kejadian dengan capaian sebesar 109,52, Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk dengan capaian 118,75, dan Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima dengan capaian sebesar 109,52. Tetapi ada indikator dengan capaian capaian Nol persen pada indikator Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun. Indikator tersebut tidak tercapai dikarenakan waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang pengadaan kegiatan ini tidak mencukupi.

*Keywords:* Evaluasi, Strategi, Penanggulangan Bencana.

### Pendahuluan

Bencana menjadi isu permasalahan kompleks yang universal, di mana membutuhkan suatu perencanaan mayang dalam penanggulangannya. Dengan perencanaan atau penataan yang matang, diharapkan penanggulangan bencana dapat secara terarah dan

terpadu. Mengingat upaya yang dilakukan sampai dengan saat ini belum menggunakan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, yang mengakibatkan sering terjadi tumpang tindih dan bahkan terdapat langkah upaya yang penting tidak tertangani.

Urusan bencana merupakan pembahasan yang sangat

komprehensif dan multi dimensi. Menyikapi terjadinya bencana yang frekuensinya terus meningkat setiap tahun, pemikiran terhadap penanggulangan bencana harus dipahami dan diimplementasikan oleh semua pihak. Bencana adalah urusan semua pihak. Indonesia membangun sistem nasional penanggulangan bencana secara berkala. Sistem nasional ini mencakup beberapa aspek antara lain dari sisi legislasi di mana Pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Aspek yang kedua adalah kelembagaan yang dapat ditinjau dari sisi formal dan non formal. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) secara formal merupakan focal point lembaga pemerintah di tingkat pusat. Sedangkan yang menjadi focal point penanggulangan bencana di tingkat provinsi dan kabupaten/kota adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sementara itu dari sisi non formal adalah forum-forum baik di tingkat nasional dan lokal dibentuk untuk memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Dan aspek yang tidak kalah pentingnya adalah pendanaan.

Saat ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Saat

ini kebencanaan bukan hanya isu lokal atau nasional, tetapi melibatkan internasional. Komunitas internasional mendukung Pemerintah Indonesia dalam membangun manajemen penanggulangan bencana menjadi lebih baik. Di sisi lain, kepedulian dan keseriusan Pemerintah Indonesia terhadap masalah bencana sangat tinggi dengan dibuktikan dengan penganggaran yang signifikan khususnya untuk pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan. Beberapa pendanaan yang terkait dengan penanggulangan bencana di Indonesia antara lain dana DIPA (APBN/APBD), dana Kontijensi, dana On-call, dana Bantual Sosial Berpola Hibah, dana yang bersumber dari masyarakat, hingga dana dukungan komunitas internasional.

Terdapat beberapa factor penghambat yang mempengaruhi penanggulangan bencana di Pemerintah daerah kabupaten/kota, di antaranya adalah dari segi kelembagaan, disiplin aparatur, anggaran, sumber daya, fasilitas dan lingkungan yang kurang kondusif. Sedangkan factor yang bisa mendukung adalah regulasi atau peraturan tentang penanggulangan bencana. Penelitian ini berupaya mengkaji dan menganalisa efektifitas dan efisiensi strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun Tahun 2022, agar bisa menjadi feedback untuk perencanaan penanggulangan bencana pada Tahun-tahun berikutnya.

Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Sebagaimana disampaikan Subarsono (2005), Evaluasi kebijakan memiliki beberapa tujuan, antara lain: (1) Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan, (2) Mengukur tingkat

efektifitas suatu kebijakan, (3) Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan, (4) Mengukur tingkat keluaran (outcome) suatu kebijakan, (5) Mengukur dampak suatu kebijakan, (6) Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan, dan (7) Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang.

Sebagaimana disampaikan (Sumber: Dunn, 2003:610), kriteria evaluasi adalah: (1) efektifitas, (2) efisiensi, (3) kecukupan), (4) pemerataan, (5) responsivitas, (6) ketepatan. Berdasarkan kriteria di atas, evaluasi membagi beberapa tipe kriteria diantaranya: efektivitas merupakan suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Intinya adalah efek dari suatu aktivitas. Kedua yaitu efisiensi, berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Ketiga, kecukupan merupakan sejauhmana tingkat efektivitas dalam memecahkan masalah untuk memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan masalah.

Sementara itu Kelly (dalam Kusumasari, 2014) mendefinisikan manajemen bencana meliputi rencanastruktur, serta pengaturan yang dibuat dengan melibatkan usaha dari pemerintah, sukarelawan dan pihak-pihak swasta dengan cara terkoordinasi dan komprehensif untuk merespons seluruh kebutuhan darurat. Oleh karena itu, manajemen bencana terdiri dari semua perencanaan, pengorganisasian, dan mobilisasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menangani semua fase bencana sebagai peristiwa alam yang unik.

Penanggulangan bencana (PB) merupakan rangkaian kegiatan baik

sebelum maupun saat dan sesudah terjadi bencana dilakukan untuk mencegah, mengurangi, menghindari dan memulihkan diri dari dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Secara umum kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam penanggulangan bencana adalah sebagai berikut: pencegahan, pengurangan dampak bahaya, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi dan rekonstruksi), dan pembangunan berkelanjutan yang mengurangi risiko bencana (UNDP Indonesia, 2007:23). Salah satu unsur penting dalam upaya membangun sistem penanggulangan bencana alam ini adalah dengan mengevaluasi dan mengambil pelajaran penting dari kegiatan atau sistem penanggulangan bencana alam yang sudah dilakukan selama ini. Kekuatan dan keberhasilan maupun kelemahan dan kegagalan dalam penanggulangan bencana alam yang telah dilakukan akan menjadi pelajaran penting untuk membangun sistem nasional penanggulangan bencana alam yang lebih baik di masa yang akan datang.

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk konkret dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan daerah juga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama lima tahun periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap untuk penyusunan dokumen RPJMD.

Penyusunan arah kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan harus didasarkan pada visi dan misi kepala daerah terpilih dengan

memperhitungkan semua potensi, peluang, kendala, serta ancaman yang mungkin timbul selama masa periode pemerintahan. Antisipasi terhadap segala kemungkinan yang muncul baik positif maupun negatif pada masa periode pemerintahan perlu dipersiapkan baik terkait permasalahan maupun isu strategis pada pembangunan kewilayahan. Oleh karena itu, arah kebijakan yang diambil harus melihat berbagai proyeksi pembangunan maupun analisis dan kajian dari evaluasi hasil pembangunan periode sebelumnya agar dapat diperoleh gambaran awal tentang profil daerah pada masa depan. Arah kebijakan merupakan keputusan dari stakeholder sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus

atau tema setiap tahun selama periode Dokumen RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam menentukan rumusan arah kebijakan berdasarkan pada alternatif kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya, dari alternatif kebijakan yang inherent tersebut kemudian di rumuskan arah kebijakan yang lebih umum. Perumusan arah kebijakan juga memperhatikan strategi sebagai dasar perumusannya, setiap arah kebijakan dirumuskan untuk mendukung strategi. Berdasarkan deskripsi tersebut, arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud diterangkan dalam bentuk tabel berikut ini. Untuk memperjelas alur arah kebijakan dan kebijakan umum pembangunan tahun 2018-2023 disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1  
 Strategi Arah Kebijakan Kabupaten Madiun Bidang Kebencanaan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Bencana Daerah	Tangguh Bencana dan Kriteria Tangguh Bencana Pada Desa-desa Rawan Bencana	Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan kebijakan di tingkat desa Pembentukan dan peningkatan aktivitas tim relawan PB Peningkatan upaya sistematis dalam penanggulangan bencana melalui pengkajian risiko, manajemen risiko dan pengurangan kerentanan termasuk kegiatan ekonomi produktif, alternatif untuk mengurangi kerentanan Pembinaan dan pendampingan dalam penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		bencana yang dimasukkan dalam RPJMDes Pembentukan dan peningkatan fungsi forum PRB berisikan wakil-wakil masyarakat / kelompok rentan / kelompok perempuan

Sumber : Dokumen P-RPJMD Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023

Walaupun sistem penanggulangan bencana secara nasional tersebut telah disusun pada dalam kerangka konseptual, namun implementasi sistem penanggulangan bencana juga sangat bersifat lokalitas.

Masing-masing daerah memiliki kearifan lokal dalam penanggulangan bencana maupun mengelola risiko bencana yang dapat dilihat pada Gambar 1 (Maarif dkk., 2012).



Sumber: Diadopsi dari Maarif (2012)

Gambar 1. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Berbagai lesson learnt di berbagai negara di benua Asia, Amerika, dan Afrika, menunjukkan bahwa keberhasilan program-program pengurangan risiko bencana berdasarkan partisipasi dan kontribusi komunitas. Komunitas lokal merupakan aktor utama dalam penanggulangan bencana. Pendekatan partisipatoris, keterampilan dan pengetahuan lokal (local wisdom) menjadi bagian dari sistem penanggulangan bencana yang tidak terpisahkan dan berperan besar dalam upaya pengurangan risiko bencana

(Maarif, 2013). Sejalan dengan hal tersebut, dalam kerangka legislasi penanggulangan bencana, yaitu Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana juga telah ditegaskan bahwa pentingnya peran serta masyarakat dalam penanggulangan bencana “bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dalam penanggulangan bencana”, dimana peran serta tersebut mencakup “pengambilan keputusan, memberikan informasi, pengawasan,

perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan program” (Hadi, 2020).

Telah cukup banyak inisiatif masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana di Kabupaten Madiun. Upaya tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk kegiatan. Dari mulai penyadaran masyarakat, pemetaan kawasan rawan bencana, membuat dan menyiapkan jalur evakuasi, peringatan dini banjir, membentuk kelompok siaga bencana dan lain sebagainya. Demikian juga yang dilakukan pemangku kepentingan lain seperti sektor swasta maupun kelompok-kelompok masyarakat sipil. Inisiatif ini perlu terus didorong dan dikembangkan. Pelibatan seluruh komponen pemangku kepentingan dalam perencanaan merupakan bagian dari upaya mensinergiskan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

### **Metode**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah cara kerja penelitian yang menekankan pada aspek pendalaman data demi mendapatkan kualitas dari hasil suatu penelitian yang mengandalkan uraian deskriptif kalimat, yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data, menafsirkan, dan melaporkan hasil penelitian. (Ibrahim, 2015).

Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong (2000), penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian kualitatif adalah

deskriptif. Data yang dikumpulkan mem bentuk kata-kata atau gambaran daripada angka-angka. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, fotografdi, videotape, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya.(Emzir, 2010)..

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun rekayasa manusia. (Lexy J. Moleong, 2000). Metode deskriptif adalah suatu metode metode dalam meneliti suatu status kelompok manusia, objek, suatu set kondisi, suatu system pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang di selidiki. Jadi, dapat disimpulkan metode deskriptif kualitatif adalah metode penjabaran data atau memaparkan suatu keadaan objek oleh instrument kunci penelitian (yaitu peneliti itu sendiri) kedalam kalimat yang tersusun secara sistematis berdasarkan fakta-fakta pada saat penelitian dilakukan. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan evaluasi strategi penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek dari data yang diperoleh oleh peneliti. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder, Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber data asli. Data primer dapat berupa opini subyek

(orang) secara individual atau kelompok. Data primer ini dapat dikumpulkan dengan dua metode, yaitu: metode interview (wawancara) dan metode observasi. Akan tetapi, dalam penelitian ini hanya menggunakan interview (wawancara) sebagai data primer untuk memperoleh data dari informan. Adapun pihak yang dijadikan sebagai informan, diantaranya: Kepala dan Staf Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, Masyarakat terdampak bencana, dan relawan penanggulangan bencana. Sedangkan Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Pada umumnya, data sekunder diperoleh dari riset perpustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca dan memahami teori-teori dari buku, artikel, jurnal, majalah, atau data yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu strategi penanggulangan bencana.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam hal ini, peneliti menggunakan wawancara terstruktur, di mana seorang pewawancara menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan untuk mencari jawaban atas hipotesis yang disusun dengan ketat. (Lexy. J. Moleong, 2000). Dalam melaksanakan teknik wawancara (interview), pewawancara harus mampu menciptakan hubungan yang baik sehingga informan bersedia bekerja sama, dan merasa bebas berbicara dan dapat memberikan informasi yang sebenarnya. Teknik wawancara yang peneliti gunakan adalah secara terstruktur (tertulis) yaitu dengan menyusun terlebih

dahulu beberapa pertanyaan yang akan disampaikan kepada informan. Hal ini dimaksudkan agar pembicaraan dalam wawancara lebih terarah dan fokus pada tujuan yang dimaksud dan menghindari pembicaraan yang terlalu melebar. Selain itu juga digunakan sebagai patokan umum dan dapat dikembangkan peneliti melalui pertanyaan yang muncul ketika kegiatan wawancara berlangsung. (Suharsimi Arikunto, 2002)

Teknik pengumpulan data yang kedua adalah dokumentasi. Melalui metode dokumentasi, peneliti gunakan untuk menggali data berupa dokumen terkait penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun. Dokumen yang menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari: (1) Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018-2023, (2) Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun 2018-2023 (RENSTRA), (3) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, dan (4) Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2022.

Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analitik, yaitu mendeskripsikan data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka. Data yang berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, dokumen, dan sebagainya, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan terhadap kenyataan atau realitas. (Sudarto, 2007). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama

di lapangan dan setelah selesai di lapangan. Dalam hal ini Nasution menyatakan: "Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang grounded.

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana ditegaskan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya terpaku pada tahap darurat, tetapi juga mencakup tahap pra bencana dan pasca bencana. Undang-undang tersebut juga menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik dalam situasi tidak terjadi bencana, maupun situasi terdapat potensi bencana.

Pendekatan penanggulangan bencana yang digaungkan pemerintah saat ini mendorong pelibatan semua pihak, utamanya unsur pentahelix seperti dunia usaha, media, akademisi, serta komunitas masyarakat.

Upaya-upaya penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Madiun adalah : (1) Penguatan kesiapsiagaan melalui strategi social reengineering ketahanan bencana multilevel serta peningkatan kapasitas mulai dari level keluarga, komunitas, dan desa. Indikator Persentase Desa Persentase desa/kelurahan tangguh bencana di daerah rawan bencana tidak mencapai target, yaitu dari target sebesar 68,20 hanya tercapai 43,18. Hal ini dikarenakan anggaran tidak cukup tersedia pada Kegiatan

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana. Akan tetapi capaian dari Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk adalah 18 desa dari target sebesar 16 desa. Dalam memberikan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam upaya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi Dan Edukasi (Kie) Rawan Bencana Kabupaten (Per Jenis Kegiatan) kepada masyarakat. (2) Meningkatkan sinergi program kebencanaan. Pemerintah mengambil upaya untuk menggerakkan pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan oleh semua sector. Pada Tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Madiun membentuk Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) yang terdiri dari unsur pentahelix, yaitu berbagai instansi pemerintah dan swasta, perguruan tinggi, Media, dunia usaha, potensi relawan organisasi masyarakat, dan unsur masyarakat itu sendiri di Kabupaten Magetan Madiun. Hal itu menjadi penting, sebab pengurangan risiko bencana juga sekaligus menjadi poros utama dalam menggerakkan seluruh roda kehidupan, baik ekonomi, pariwisata, sosial, budaya dan sumber daya lainnya yang dimiliki Kabupaten Madiun. Pelaksanaan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana sebanyak 1.650 orang dari target sebesar 700 orang, (3) Melakukan gerakan edukasi untuk menciptakan budaya cinta lingkungan. Upaya ini diwujudkan dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah menggelar pembinaan serta pendampingan pencegahan bencana di sekolah

sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk edukasi manajemen penanggulangan dan mematahkan potensi bencana di sekolah serta langkah antisipasi dengan pembentukan tim tanggap bencana. Dengan pelatihan ini dengan harapan agar lahir budaya sadar dengan mulai melakukan hal kecil dalam mengurangi resiko serta siap siaga bila terjadi bencana dan lebih mencintai lingkungan.

#### 1. Efektifitas Strategi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Madiun Tahun 2022

Mengukur efektifitas organisasi bukan suatu hal yang sederhana, karena keefektifan dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikan. Efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Georgopolous dan Tannemaum (dalam Indrawijaya 2008:228), efektifitas di pandang dari sudut pencapaian tujuan, dimana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan bukan saja sasaran organisasi tetapi juga mekanisme mempertahankan diri dalam mengejar sasaran. Dengan kata lain, penilaian efektifitas harus berkaitan dengan masalah sasaran maupun tujuan. Hasil penelitian melihat efektifitas BPBD dari beberapa indikator menurut Duncan dalam Richard M. Steers (1985:53), diantaranya:

(1) Pencapaian Tujuan dan Sasaran. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan yang harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pertahapan, baik dalam arti pertahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pertahapan dalam arti periodisasinya. Sehingga untuk mencapai sasaran yang telah di tentukan tersebut, berkaitan erat dengan adanya tujuan utama dari organisasi. Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Strategi yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dalam mencapai tujuannya adalah sebagai berikut : (a) meningkatkan kualitas kinerja aparatur pemerintah bidang penanggulangan bencana, (b) meningkatkan jumlah dan kapasitas relawan, dan (c) mengurangi risiko bencana di Kabupaten Madiun, (2) Adaptasi. Indikator perubahan atau adaptasi organisasi yaitu strategi yang dilakukan organisasi dalam hal ini adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, untuk menghadapi ketidaksesuaian lingkungan dalam upaya penanggulangan bencana dan respon pegawai maupun staff terhadap situasi maupun kondisi yang tak menentu. Apabila organisasi dapat mengatasi ketidaksesuaian yang terjadi dilingkungan maka dapat

dikatakan efektif namun apabila tidak, maka organisasi tersebut belum bisa dikatakan efektif. (3) Integrasi. Integrasi merupakan pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan konsensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Dalam proses integrasi diharapkan organisasi satu dengan yang lain dapat saling mengisi kebutuhan yang satu dengan yang lainnya. Keterlibatan bidang maupun pihak lainnya dalam penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun: Untuk mewujudkan tujuan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun dibutuhkan keterlibatan antara bidang satu dengan bidang lainnya agar proses penanggulangan bencana dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Berdasarkan hasil yang peneliti peroleh dilapangan, masing-masing pegawai maupun staf di BPBD menyadari akan pentingnya keterlibatan maupun koordinasi antar bidang. Apabila ada bencana yang terjadi harus segera cepat tanggap dalam menanggulangi bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun mempunyai banyak komunitas yang terlibat seperti SAR, TAGANA, PMI, TNI/POLRI dan masih banyak komunitas lainnya yang terlibat.

Dalam proses penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun, masih terdapat Adanya Kendala pada saat proses koordinasi antara BPBD dengan organisasi lainnya/pihak terkait lainnya. Di dalam proses koordinasi antara instansi satu

dengan instansi lainnya BPBD Kabupaten Madiun ditemukan hambatan maupun kendala diantaranya pada saat proses penanggulangan seperti misalnya koordinasi satu relawan setiap desa melaporkan terjadi bencana dan langsung ditindak lanjuti sesuai dengan berita yang disampaikan kita koordinasikan juga dengan dinas sosial PU,PMI, dan BKUD kendala koordinasinya biasanya sudah dberitahu tapi tidak segera bergerak bisa jadi dikarenakan tidak berslogan tanggap sehingga pergerakannya kurang komit. Seperti dalam penelitian Rahmat Wijanarko (2022) bahwa ada 4 faktor utama yang menghambat efektivitas dalam pemberian bantuan logistik diantaranya adalah keterbatasan sumber daya logistik dan peralatan, kurangnya sumber daya manusia, keakuratan informasi, dan keterbatasan anggaran, kemudian mengakibatkan buruknya koordinasi antar OPD, kurangnya sumber daya manusia, keakuratan informasi, dan keterbatasan anggaran, kemudian mengakibatkan buruknya koordinasi antar perangkat daerah.

Dalam mengoptimalkan tugasnya dalam penanggulangan bencana, Kabupaten Madiun melakukan sosialisasi tentang upaya penanggulangan bencana. Sosialisasi sudah dilaksanakan seminggu sekali dan diajarkan bagaimana cara assesment, tahap rekon, misal istilahnya menggungsi atau menangani wilayah itu pra bencaa. Setiap kecamatan pasti ada sosialisasi penanggulangan bencana seperti pemetaan wilayah tanah longsor di himbauan kepada masyarakat

setempat tetapi kadang masyarakat sangat susah diberikan pemahaman khususnya yang berada di daerah rawan tanah longsor. Jika masyarakatnya sendiri susah diberi pemahaman seperti misalnya pemasangan alat dan tanda-tanda kalau ada kejadian yang akan terjadi dengan menjaga terus peralatannya terus dipasang rambu-rambu jalur.

Dalam proses penanggulangan bencana sering kekurangan alat dalam proses penanggulangan sehingga menjadi sebuah penghambat dalam penanggulangan kita butuh alat dan saat itu alatnya juga dipakai oleh dinas lain otomatis kita menggunakan alat seadanya dan mengakibatkan tidak efektifnya penanggulangan bencana yang terjadi. Masyarakat kurang memahami potensi bencana di sekitar dan alat-alat evakuasi yang digunakan. Seperti penelitian Adelina Manullang, Maesaroh (2019) bahwa, efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Madiun belum efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, terbatasnya sumber daya manusia, jumlah kapasitas maupun kompetensi aparatur organisasi, kapasitas kelembagaan yang belum memadai dimana kepala Pelaksana organisasi masih dijabat oleh Eselon III, yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan perangkat daerah terkait.

## 2. Efisiensi Strategi Penanggulangan Bencana di Kabupaten Madiun Tahun 2022

Adapun tahap analisis data efisiensi pada Kinerja Program

Penanggulangan Bencana di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut : (1) Menghitung capaian keluaran (output) kegiatan Tahun 2022, (2) Menghitung efisiensi realisasi anggaran tahun 2022, dan (3) Melakukan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar antar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut:

$$NE = 50\% + \left(\frac{E}{20} \times 50\right)$$

NE adalah nilai efisiensi dan E adalah efisiensi

Dan (4) menentukan kategori nilai efisiensi dengan kriteria: nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80%, pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%, pelaksanaan anggaran dikatakan kurang efisien dan nilai efisiensi dibawah 50%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat kurang efisien.

### 2.1. Indikator Tujuan dan Sasaran

Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Bupati Madiun Nomor 9 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun. Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun disajikan pada lampiran tabel di bawah ini:

Tabel 2  
 Pencapaian Tujuan dan sasaran BPBD Tahun 2022

No	Kebijakan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tujuan OPD: Meningkatkan Ketahanan Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Skor	160	113,40	141%
2	Sasaran OPD: Meningkatkan Kapasitas Daerah	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Skor	0,3	0,42	140%

Sumber : BPBD Kabupaten Madiun Tahun 2022

Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan tingkat risiko bencana suatu daerah didasarkan atas variable ancaman, kerentanan dan kapasitas. Semakin tinggi nilai IRB artinya semakin tinggi tingkat risiko bencana di daerah tersebut. Nilai IRB Kabupaten Madiun pada Tahun 2022 adalah 113,40 dan termasuk dalam kategori sedang. Sedangkan hasil perhitungan Indeks Ketahanan Daerah (IKD) Kabupaten Madiun diperoleh nilai yaitu 0,42 dan masuk dalam kategori sedang. Berdasarkan nilai IRB dan IKD Kabupaten Madiun menggambarkan bahwa Kabupaten Madiun memiliki potensi bencana yang sedang dan ketahanan daerahnya yang sedang, untuk meningkatkan ketahanan daerah maka dibutuhkan upaya - upaya peningkatan kapasitas lebih tinggi lagi untuk menurunkan risiko bencana yang ada. Tingkat efisiensi kinerja BPBD Kabupaten Madiun

seperti digambarkan pada tabel di atas. Sasaran strategis Meningkatnya Kapasitas Daerah dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD) memiliki tingkat efisiensi yang tinggi hingga 45,23%, dimana capaian kinerja indikator IKD telah melebihi target yang ditentukan. Secara garis besar pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sudah mencapai target yang ditetapkan namun terdapat satu sub kegiatan dengan realisasi 0% yaitu Sub Kegiatan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten / Kota dikarenakan pelaksanaan kegiatan ini tidak mencukupi waktu yang dibutuhkan untuk proses lelang pengadaannya. Tingkat efisiensi tertinggi yaitu pada sub kegiatan Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana dengan indikator Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana dari target 700 orang dapat terealisasi sebanyak 1.650 orang sehingga tingkat efisiensi mencapai 141,71%.

Sedangkan untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagian besar memiliki tingkat ketercapaian yang seimbang antara target indikator dengan capaian realisasi anggarannya. Berdasarkan hasil penelitian Ihsan Masdrian dkk (2022) bahwa pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam melakukan efisiensi perencanaan anggaran belum dapat dilakukan dengan optimal. Dilihat dari formulasi kebijakan anggaran kebijakan yang berubah-ubah dikarenakan perubahan anggaran yang banyak terjadi ditambah dikarenakan adanya pandemi Covid-19 perubahan anggaran yang tidak diduga, selain itu dilihat dari operasional anggaran Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus melakukan perekrutan pegawai sehingga memakan anggaran yang cukup besar,

dan juga kualitas kompetensi pegawai dalam perencanaan anggaran belum optimal. Seperti penelitian Pada penelitian sebelumnya pada judul “Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan” dilakukan oleh (Wance, 2019) bahwa pada permasalahan yang dilakukan penelitian tersebut dikarenakan rencana anggaran sebagai alat memprediksi perencanaan pembangunan satu periode ke depan dan juga untuk mengetahui dinamika perumusan

2.2. Indikator Kinerja Program Penanggulangan Bencana Tingkat efisiensi kinerja Program Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun, dengan output dari indicator indicator pendukung seperti dalam tabel berikut :

Tabel 3  
 Perhitungan Efisiensi Output Kegiatan BPBD Tahun 2022

No	Output	% Realisasi Anggaran	Capaian Output Kegiatan	Efisiensi	Nilai Efisiensi	Kategori
1	Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun	0	0	100	300	Sangat Efisien
2	Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti	95,78	100	4,22	60,55	Cukup Efisien
3	Jumlah SDM/masyarakat	92,60	150	7,40	68,50	Cukup Efisien

<i>yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana</i>						
4	<i>Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana</i>	93,99	235,7	6,01	65,03	Cukup Efisien
5	<i>Jumlah kejadian bencana yang ditangani</i>	95,79	109,52	4,21	60,52	Cukup Efisien
6	<i>Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan</i>	99,08	100	0,92	52,3	Kurang Efisien
7	<i>Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk</i>	98,83	118,75	1,17	52,93	Kurang Efisien
8	<i>Jumlah laporan Kejadian Bencana yang diterima RATA-RATA</i>	99,90	109,52	0,10	50,25	Kurang Efisien

Berdasarkan tabel Penilaian Efisiensi pada Output kegiatan di atas, Nilai Efisiensi dengan kategori efisien pada output Persentase laporan kejadian yang ditindaklanjuti, Jumlah SDM/masyarakat yang mengikuti pelatihan mitigasi bencana, Jumlah peserta yang mengikuti gladi kesiapsiagaan bencana, Jumlah kejadian bencana yang ditangani. Sedangkan Nilai Efisiensi dengan kategori Kurang Efisien pada output Jumlah dokumen kebencanaan yang dihasilkan, Jumlah desa tangguh bencana yang terbentuk, dan Jumlah laporan kejadian bencana yang diterima.

Untuk indikator Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang disusun dengan nilai realisasi 0%, mempunyai

Nilai efisiensi 300 kategori sangat efisien, akan tetapi target target tidak dapat terpenuhi. Penyusunan Kajian Risiko Bencana (KRB) Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang tersusun memiliki capaian 0%. Dokumen KRB merupakan dasar dari penyusunan dokumen perencanaan daerah terkait pelaksanaan penanggulangan bencana seperti Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) maupun Dokumen Rencana Kontijensi, dimana semua dokumen tersebut merupakan pemenuhan SPM sub Urusan Bencana sehingga BPBD wajib menyusunnya secara bertahap dan terintegrasi. Mengingat

urgensinya Penyusunan Dokumen KRB sehingga harus segera dilaksanakan, namun ternyata sesuai hasil reviu Dokumen Persiapan Pengadaan Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten Madiun oleh Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang/Jasa Nomor Rev.01/1222/402.302/2022 terdapat kendala dimana waktu pelaksanaan tidak mencukupi untuk dilaksanakan pada sisa tahun anggaran 2022. Seperti penelitian Pada penelitian sebelumnya pada judul “Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan” dilakukan oleh (Wance, 2019) bahwa pada permasalahan yang dilakukan penelitian tersebut dikarenakan rencana anggaran sebagai alat memprediksi perencanaan pembangunan satu periode ke depan dan juga untuk mengetahui dinamika perumusan APBD Buru Selatan.

## Penutup

Berdasarkan hasil Evaluasi Strategi Penanggulangan Bencana di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun tahun 2022 maka dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Madiun. Tingkat efektivitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Di Kabupaten Madiun belum efektif secara

maksimal meskipun untuk beberapa indicator mencapai target. Hal ini dibuktikan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana, terbatasnya SDM jumlah kapasitas maupun kompetensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kapasitas kelembagaan yang belum memadai dimana kepala Pelaksana BPBD masih dijabat oleh Eselon III, yang mengakibatkan adanya hambatan dalam mengkoordinasikan kegiatan dengan perangkat daerah terkait. (2) Efisiensi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanggulangan Bencana Di Kabupaten Madiun. Tingkat efisiensi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun adalah dalam kategori Efisien. Pada indikator Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang tersusun memiliki Nilai Efisiensi yang tinggi, akan tetapi dengan target yang tidak tercapai, hal ini disebabkan karena regulasi daerah yang tidak memungkinkan untuk melakukan Proses Lelang pada Tri Wulan 4, dikarenakan alokasi anggaran tersedia pada Tahapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022. namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun berinisiatif untuk menggalang partisipasi pemerintah desa untuk secara mandiri dengan didampingi melakukan pelatihan dengan membentuk desa tangguh bencana dan terbentuk sebanyak 30 desa tangguh bencana yang melibatkan 1.500 orang. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, efektivitas strategi penanggulangan bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah masih ditemukan kendala dalam pencapaian tujuan di Kabupaten Madiun. Hal yang perlu ditingkatkan dalam meningkatkan

penanggulangan bencana di Kabupaten Madiun adalah untuk melakukan pencerdasan kepada masyarakat hal ini harus menekankan pada beberapa hal yaitu potensi bencana di daerah tersebut, karakteristik bencana, tanda-tanda akan adanya bencana, cara pencegahannya, serta hal yg perlu ditekankan adalah peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berbagai keterbatasannya melalui hal tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih memahami bencana yang ada serta peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan berbagai keterbatasannya sehingga masyarakat diharapkan mau bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Madiun namun mengingat anggaran yang ada.

#### Daftar Pustaka

- Ananta Wikrama Tungga, Komeng Adi Kurniawan Saputra, dan Diota Prameswari Vijaya, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 67.
- Aprilia Mardiasuti . 2015. **EVALUASI TERHADAP KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI KAJIAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM) PADA UNIT REFERENSI PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS GAJAHMADA**
- Faturahman, Burhanudin Mukhamad. (2017). *Reformasi Administrasi dalam Manajemen Bencana*. *Mimbar Yustisia*, 1(2), 185-201.
- Gie (2012:27), *Kamus Administrasi*. Jakarta : Edisi Kedua, Gunung Agung

- Ghony, M. Djunaidi & Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), Hal 89
- Ratminto, Atik Septi Winarsih. 2016. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dwiyanto, Agus (Editor), 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan publik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press bekerjasama dengan Japan International Cooperation Agency (JICA)
- David, F. R. (2017). *Manajemen Strategik Suatu Pendekatan Keunggulan Bersaing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Emzir, *Analisis Data: Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal 2.
- Hadi, S. (2020). *Pengurangan Risiko Pandemi Covid-19 Secara Partisipatif: Suatu Tinjauan Ketahanan Nasional terhadap Bencana*. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 177– 190. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.109>.
- Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, (Malang: UMM Press, 2004), hal 83.
- Heryanto Monoarfa. 2012. *Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pelayanan Publik: Suatu Tinjauan Kinerja Lembaga Pemerintahan*. <https://ejurnal.ung.ac.id>
- Hessel Nogi S. Tanglisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta :

- PT Grasindo, 2005), hlm. 141  
Ibrahim, Metode Penelitian  
Kualitatif, (Bandung:  
Alfabeta, 2015), hlm. 52
- I MADE YUDHANTARA. 2021.  
Teori Manajemen Publik.  
[https://www.researchgate.net/  
publication/](https://www.researchgate.net/publication/)
- Lailan Nahar. 2016. Studi Deskriptif  
tentang Strategi Badan  
Penanggulangan Bencana  
Daerah Kabupaten Pasuruan  
dalam Penanggulangan  
Bencana Kekeringan Di  
Wilayah Kabupaten Pasuruan.  
Kebijakan dan Manajemen  
Publik. Volume 4, Nomor 2,  
Mei-Agustus 2016
- Maarif, S. (2012). Pikiran dan  
Gagasan Penanggulangan  
Bencana di Indonesia. In  
Bintek Manajemen  
Penyusunan Peta Rawan  
Bencana.
- Maarif, S. (2013). Meningkatkan  
Kapasitas Masyarakat Dalam  
Mengatasi Risiko Bencana  
Kekeringan. Jurnal Sains Dan  
Teknologi Indonesia, 13(2),  
65–73. [https://  
doi.org/10.29122/jsti.v13i2.88  
6](https://doi.org/10.29122/jsti.v13i2.886).
- Moenir, H. A. S. 2006. Manajemen  
Pelayanan Umum. Jakarta:  
PT. Bumi Aksara Mutroni  
Heffy. 2020. REFORMASI  
MANAJEMEN  
PELAYANAN  
PUBLIKMENUJU GOOD  
GOVERNANCE. Badan  
Diklat Provinsi Kaltim.  
Nurjanah, R. S., Kuswanda D.,  
Siswanto B.P., &  
Adikoesoemo. (2012).  
Manajemen Bencana.  
Bandung: Alfabeta.
- Nurmandi, Achmad. (2010).  
Manajemen Pelayanan Publik.  
Yogyakarta : PT Sinergi Visi  
Utama
- Sri Maulidiah. 2015. DINAMIKA  
PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PUBLIK DI  
INDONESIA (Studi  
Efisiensi, Partisan dan Non  
Partisan).  
<https://journal.uir.ac.id/>
- Soedarmanto (2015) Kinerja dan  
Pengembangan Kompetensi  
SDM Yogyakarta : Pustaka  
Belajar
- Shofiana Syam. 2020. PENGARUH  
EFEKTIFITAS DAN  
EFISIENSI KERJA  
TERHADAP KINERJA  
PEGAWAI PADA KANTOR  
KECAMATAN
- BANGGAE TIMUR. Profitability:  
Jurnal Ilmu Manajemen p-  
ISSN: 2714- 6332–e-ISSN:  
2714-6324 Vol.4 Nomor 2 Juli  
2020
- Stoner. Manajemen, Edisi Bahasa  
Indonesia, (Penerbit PT.  
Prehallindo, Jakarta.2010) 2  
Amirullah, Pengantar  
Manajemen, Cetakan Kedua,  
(Yogyakarta: Graha Ilmu,  
2011), h. 2
- Syamsi, I. 2007. Efisiensi, Sistem,  
dan Prosedur Kerja. Jakarta :  
Bumi Aksara.
- Tjiptono, Fandy. 2005. Prinsip-  
prinsip (Total Quality  
Service).Yogyakarta: C.V  
Andi offset
- Wijaya, David. 2012. Pemasaran Jasa  
Pendidikan “Mengapa sekolah  
memerlukan marketing?”.  
Jakarta Selatan: Salemba  
empat.

UNDP Indonesia, 2007. Laporan  
Tahunan UNDP. Jakarta